

Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan dalam Pemilu 1999 di Kota Padang

Oleh : Al Rafni dan Suryanef

Abstract

This article intended to provides an explanation of how women political comprehension and their party identification in 1999 general election in Padang. The data is collected from 200 respondents by questionnaire and analyzed by using quantitative descriptive method. Data finding shows majority of respondents engage to superficial political comprehension. Women political comprehension is only better in case of real political nuance such as presidential power, bureaucracy service and general election management. Meanwhile, in general, level of party identification is found rather weak which is resulted to easiness for women to being politicized. Party preferences of respondents in 1999 general election were PAN, PPP, Golkar, PK and PDI-Perjuangan in a row.

I. PENDAHULUAN

Pada pemilu 1999 ini, berdasarkan hasil penelitian Asia Foundation sebagaimana dikutip oleh *Rina Morita* (1999) di Indonesia, terdapat pemilih perempuan yang berjumlah 57% dari keseluruhan pemilih terdaftar. Ini merupakan sebuah potensi dan kekuatan besar yang perlu disadari oleh kaum perempuan dimana pada even politik yang sangat penting pun (seperti pemilu) keberhasilannya juga turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum perempuan. Pada tingkat lokal seperti Provinsi Sumatera Barat juga ditemui fenomena yang sama dimana pemilih perempuan yang terdaftar pada pemilu 1999 adalah 1.240.306 orang (57%) dari keseluruhan pemilih. Sementara itu untuk Kota Padang dari 396.048 pemilih, 204.395 (52,46%) diantaranya adalah perempuan.

Sayangnya besarnya kontribusi yang diberikan perempuan pada even politik seperti pemilu tersebut tidak sebanding (paralel) dengan kedudukan dan hak-hak politik yang dimilikinya. Satu contoh kongkrit dapat dikemukakan lemahnya partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan di tingkat publik.

Contoh lain dapat dilihat *Human Development Report 1995 United Nation Development Programme (UNDP)* sebagaimana yang dikutip oleh *Gaffar* (1996), memberikan sorotan tentang

posisi kaum perempuan di dunia termasuk perempuan Indonesia. *UNDP* secara khusus memberikan sorotan tentang kontribusi yang besar dari kaum perempuan terhadap ekonomi akan tetapi pengakuan yang diperolehnya ternyata jauh lebih rendah dari kaum laki-laki. Lebih rinci dalam laporan tersebut dipaparkan bahwa hanya 7% kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki yang menempati jabatan *administrative and managerial position*.

Fakta-fakta di atas secara langsung berbicara sendiri betapa masih lemahnya kedudukan politik perempuan di Indonesia. Lebih ironis lagi *Vicky Randall* (1982) sebagaimana dikutip *Siagian* (1996) mengungkapkan bahwa alasan terbanyak keberadaan perempuan dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik adalah karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu seperti ayah, suami, mertua dan sebagainya.

Realitas yang telah dikemukakan sebelumnya telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo. *Anders Uhlin* (1997) mengungkapkan struktur hubungan jender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan jender dalam kepolitikan Orde Baru dapat ditemui dalam *kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai output dari sistem politik, bersemayamnya ideologi patriarki dan menjadikan wanita sebagai alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah* terutama menjelang pemilu.

Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang serius bagaimana sesungguhnya pemahaman politik perempuan serta preferensi politik mereka terhadap suatu partai dan bagaimana pula perilaku-memilih perempuan dalam pemilu. Dengan mengetahui hal ini diharapkan dapat dilakukan identifikasi langkah-langkah berikutnya bagi pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1999.

Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini ingin menjawab pertanyaan berikut : *bagaimanakah pemahaman politik dan identifikasi kepartaian perempuan dalam pemilu 1999 di Kota Padang?*

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, pisau analisis yang digunakan adalah teori perilaku memilih (*voting behavior*) serta menelusuri bagaimana perempuan dalam setting politik di Indonesia.

Mengkaji perilaku memilih memerlukan pemahaman yang cermat terhadap dua pendekatan dominan dalam studi ini. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan

psikologis. Pendekatan sosiologis mencermati perilaku memilih dari dimensi norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian pemahaman terhadap pengelompokan sosial, baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik. Oleh karena itu pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi politik seseorang terhadap salah satu partai politik merupakan produk dari karakter sosial ekonomi individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992: 5). Dengan kata lain pola memilih seseorang dapat diramalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya.

Pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan psikologis berangkat dari asumsi penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri individu sebagai produk dari proses sosialisasi. Oleh sebab itu konsep sikap dan sosialisasi merupakan hal yang amat penting dalam pendekatan ini.

Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses sosialisasi politik yang dialaminya sepanjang hidup. Sosialisasi adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakatnya, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat di mana seseorang itu hidup. Sedangkan sosialisasi politik menunjukkan pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1974: 44). Dengan demikian, pendekatan ini percaya pada apa yang disebut sebagai “agen” dari sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, partai politik dan organisasi massa, tempat bekerja dan sebagainya.

Melalui proses sosialisasi politik tersebut terbentuk ikatan psikologis seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang berwujud simpati terhadap organisasi atau partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah yang disebut identifikasi kepartaian (*party identification*). Identifikasi partai ini merupakan

konsep yang amat penting dalam pendekatan psikologis. Mereka berpendapat bahwa identifikasi partai merupakan faktor penjelas yang dominan terhadap perilaku memilih (*voting behavior*).

Selanjutnya bagaimana perempuan dalam konteks politik Indonesia, *Hadiz, dkk.* (1998) telah meneliti beberapa kebijakan dalam kepolitikan Orde Baru yang membakukan peran jender. Dari lima kelompok teks hukum yang diteliti yaitu teks GBHN sejak tahun 1973 sampai GBHN 1998, beberapa perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri dan beberapa peraturan daerah, dapat dicermati analisis mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembakuan peran jender dalam teks-teks tersebut. Sepanjang GBHN 1978 sampai 1998 kata *kodrat* tetap hadir dalam teks. Memang kata ini dapat diinterpretasikan secara berbeda. *Pertama*, sebagai reproduksi biologis seperti kemampuan perempuan mengandung, menyusui dan melahirkan. *Kedua*, tidak hanya sebatas kemampuan biologis diperluas ke wilayah sosial yakni karena perempuan yang melahirkan maka peran mengasuh dan membesarkan anak merupakan kodratnya. Dengan demikian perempuan sajalah yang berperan ganda.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut negara Orde Baru telah membakukan peran jender yang berakibat domestikasi, marginalisasi dan eksploitasi ekonomi, beban ganda serta subordinasi seksual. Perempuan telah didomestikasi secara sistematis oleh negara. Di samping didomestikasi secara ekonomi, perempuan juga didomestikasi secara politis yaitu mempolitikasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan.

Mempolitikasi perempuan dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi seperti halnya KOWANI.

Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya *Panca Tugas* yang dirumuskan oleh Menteri Urusan Peranan Wanita yaitu (1) sebagai istri yang membantu suami; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka; (3) sebagai manajer di dalam

mengelola rumah tangga sebagai rumah bagi suami dan anak; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari *Panca Tugas* ini tercermin negara menerapkan ideologi *ibuisme* (Murniati, 1998) yang menempatkan wanita sebagai ibu utama dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Ideologi tersebut memposisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara politis dimanipulasi untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifikasi perempuan. Senada dengan konsep *ibuisme*, *Mies* (Abdullah, 1997) menggunakan istilah *housewifization* untuk menunjukkan suatu kondisi dimana perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai peran utama sehingga segenap aspek kehidupan perempuan sangat diwarnai oleh anggapan ini.

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta membatasi geraknya di sektor lain. Ideologi *ibuisme* diciptakan oleh negara dalam rangka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996).

Menurut Vina Salviana (1995) kelangkaan elit politik perempuan berkaitan dengan rendahnya kualitas perempuan sendiri dalam berpolitik. Maksudnya perempuan kurang memiliki greget dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kondisi ini kemungkinan dipengaruhi sistem patriarki. Rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai lembaga legislatif disebabkan oleh beberapa indikator antara lain : (1) pola partisipasi dan rekrutmen perempuan belum jelas; (2) pola sosialisasi serta pendidikan politik perempuan belum mengakar; (3) adanya dominasi laki-laki atas perempuan; (4) faktor intern perempuan itu sendiri yang lebih mementingkan rumah tangga (reproduksi sosial); dan (5) tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah. Dari lima faktor ini pola sosialisasi dan pendidikan politik perempuan merupakan kunci pemberdayaan perempuan dalam meraih hak-hak politiknya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 200 orang responden yang pengambilannya dilakukan secara *proporsional random sampling*

di seluruh wilayah Kota Padang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang sebelumnya diujicoba untuk memperoleh instrumen yang memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dengan menggunakan teknik belah dua (*split half method*) (Djamiludin Ancok dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984: 139). Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman politik berhubungan dengan aspek kognisi, afeksi dan evaluasi terhadap realitas politik yang ada. Oleh karena itu pemahaman politik akan berimplikasi terhadap kesadaran seseorang untuk menentukan posisi dalam suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi program yang ditawarkan oleh kontestan pemilu.

Pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali pemahaman politiknya dikelompokkan ke dalam 11 tema berikut: (1) pemahaman tentang peranan Lembaga Perwakilan Rakyat; (2) pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan MPR dan DPR dari segi struktur dan fungsinya; (3) pengetahuan tentang prinsip keterwakilan yang adil dalam rekrutmen anggota dewan; (4) pemahaman tentang kekuasaan kepresidenan; (5) pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara (6) pengetahuan tentang perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara; (7) pengetahuan tentang pelayanan yang diberikan pegawai pemerintah (birokrasi); (8) pemahaman tentang partai politik dan peran partai politik; (9) pemahaman tentang pelaksanaan pemilu; (10) pemahaman tentang kebebasan pers; dan (11) pemahaman tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengadakan demonstrasi.

Dari temuan tersebut disimpulkan bahwa secara umum pemahaman politik perempuan masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Namun secara khusus atau pada tema-tema tertentu terutama menyangkut pertanyaan-pertanyaan seputar suasana kepolitikan secara “riil politik”, pemahaman politiknya bisa digolongkan sangat baik. Hal ini bisa dicermati melalui jawaban responden terhadap pertanyaan seputar kekuasaan kepresidenan. Dalam konteks ini terlihat 80% responden tergolong sangat baik pemahamannya terhadap corak kekuasaan kepresidenan, lalu 14% tergolong baik. Sementara hanya 6% dari responden yang tergolong kurang. Dari data ini terlihat jelas pandangan responden terhadap pelaksanaan kekuasaan kepresidenan yang jauh mengalami perubahan pasca kejatuhan Soeharto.

Pencermatan lebih lanjut dari jawaban responden yang sangat baik pada tema-tema sebagai berikut: (1) prinsip keterwakilan pada rekrutmen anggota dewan; (2) pelayanan birokrasi; (3) penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat pemilu; (4) pemahaman kompetisi antar partai politik. Keempat tema ini ditambah tema tentang kekuasaan kepresidenan merupakan tema yang tampaknya sangat dipahami responden. Dengan begitu untuk suasana riil politik sehari-hari sebagian besar responden menguasai dan melek politik.

Untuk lebih dalam dapat dicermati jawaban responden pada tema-tema tersebut. Tema yang menyangkut prinsip keterwakilan yang adil dalam rekrutmen anggota dewan dijawab oleh 78% responden dengan pendeskripsian jawaban yang tergolong sangat baik. Dengan kata lain kebanyakan responden memahami bahwa dalam merekrut anggota dewan era reformasi telah terjadi pergeseran yang sangat berarti dari cara-cara kolusi dan nepotisme kepada keinginan rakyat. Sementara penyebaran jawaban lainnya dikategorikan 12% baik, 8% cukup baik dan 2% yang kurang. Demikian pula untuk tema pelayanan birokrasi dengan distribusi jawaban responden adalah 78% sangat baik dan 14% baik. Fakta ini menunjukkan bahwa sebanyak 92% responden memahami betul kenyataan pelayanan birokrasi atau aparat pemerintah bila berhadapan dengan masyarakat umum. Sudah bukan rahasia lagi bahwa birokrasi di tengah-tengah masyarakat menengah ke bawah dirasakan sangat berbelit-belit. Pendeskripsian jawaban responden juga disertai contoh-contoh kongkrit bagaimana pelayanan yang mereka rasakan bila bersentuhan dengan kebijakan politik ataupun aparat birokrasi yang melakukan pelayanan publik.

Hal senada ditemukan pada jawaban responden pada tema seputar pemilu. Pada penyebaran jawaban responden terhadap kompetisi antar partai politik peserta pemilu, terlihat 60% responden berada dalam kategori sangat baik, 16% baik. Ini berarti 76% dari responden mampu mendeskripsikan suasana kehidupan kepartaian saat ini, terutama pada masa-masa pemilu dimana masing-masing partai berkompetisi relatif secara adil dan fair. Sementara itu pemahaman responden tentang pelaksanaan pemilu pada masa ini memperlihatkan bahwa 86% menjawab dengan apa adanya kondisi riil pelaksanaan pemilu 1999 yang dapat dikatakan berlangsung lebih demokratis jika dibandingkan era Orde Baru. Sisa penyebaran jawaban responden untuk tema ini adalah 14% baik dan tak satupun yang cukup baik apalagi kurang paham sama sekali.

Dari uraian lima tema yang sangat kental dengan nuansa kepolitikan riil yang dilaksanakan sehari-hari terlihat kenyataan positif pemahaman responden. Bisa jadi realitas pemahaman responden antara lain disebabkan oleh karena bergulirnya reformasi politik yang telah mewujudkan transparansi informasi tentang segala kenyataan yang terjadi pada sistem politik. Artinya masyarakat dapat mengakses berita tentang dinamika dan proses politik yang tengah terjadi melalui berbagai media informasi.

Walaupun lima tema dari pemahaman politik sebelumnya dikategorikan pada pemahaman yang sangat positif, namun bila dicermati lagi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pemahaman politik perempuan adalah masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Kenyataan ini dapat dideteksi dari jumlah jawaban responden yang terbanyak pada kategori cukup baik dan kurang. Terutama sekali pada sebagian besar tema-tema yang menyangkut pengetahuan dasar politik dan pengetahuan tentang menjadi warga negara yang baik. Tema tentang pengetahuan dasar politik seperti perbedaan dan persamaan antara MPR dengan DPR, baik pada sub tema struktur maupun fungsi terlihat lebih 78% responden pendeskripsianannya tergolong cukup baik dan kurang paham sama sekali. Demikian juga tentang sub tema cara pengisian keanggotaan MPR dan DPR lebih dari 82% responden kategori jawabannya hanya cukup baik dan kurang paham.

Kenyataan lain yang turut mendukung bukti dangkalnya pemahaman pengetahuan dasar responden adalah dalam tema tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara sebagai wujud warga negara yang baik. Ini dibagi ke dalam dua sub tema yaitu pengertian hak dan kewajiban serta perincian hak dan kewajiban bernegara yang dimiliki oleh seorang WNI. Kedua pertanyaan diarahkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari dua sub tema ini diperoleh jawaban responden 60-70% pada kategori kurang paham sama sekali.

Pemahaman akan hak dan kewajiban ini sebenarnya menarik untuk diperhatikan. Selama ini setiap individu di Indonesia tidak menempati posisi sebagai warga negara secara utuh melainkan sebagai warga masyarakat yang dihadapkan dengan negara, rakyat yang dihadapkan pada penguasa atau massa yang dihadapkan pada elit. Sebagai warga masyarakat, setiap individu memulai dan mengakhiri hidupnya di dalam batas-batas dan kontrol negara. Setiap individu, sebagai bagian dari rakyat, digambarkan orang kebanyakan yang bodoh, miskin, rakus, tidak beradab, dan

sebagainya, sehingga harus selalu dibina oleh pemerintah. Mereka harus selalu patuh pada pemerintah. Di sisi lain, rakyat selalu dimanipulasi oleh berbagai komponen bangsa bahwa mereka bertindak atas nama rakyat. Setiap pejabat akan selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat banyak, meski mereka menindas banyak individu yang termasuk dalam bagian rakyat. Sebagai bagian dari massa. Setiap individu adalah barang mainan yang selalu dimanipulasi oleh para elit politik untuk kepentingan politik mereka. Massa digambarkan sebagai kerumunan anarkhis yang mudah menimbulkan keributan.

Karena itu, secara substansial setiap individu selama ini lebih mengenal kewajibannya daripada hak-haknya sebagai warga negara. Demikian juga dengan para responden penelitian yang mengaku paham akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena menggunakan rujukan konstitusi UUD 1945. Dalam konstitusi itu secara normatif ditegaskan akan hak-hak politik, sosial dan ekonomi warga negara. Tetapi pengetahuan mereka akan hak-hak itu tidak ditransformasikan menjadi bentuk perjuangan untuk menegakkan hak-hak warga negara yang selama ini hilang karena ditindas oleh negara.

Dangkalnya pemahaman politik responden juga terlihat pada jawabannya terhadap tema-tema tentang pengertian dan fungsi partai politik. Hanya 2% responden yang dapat dinyatakan mempunyai pengetahuan positif tentang hal ini, selebihnya terdistribusi pada baik (6%), cukup baik (20%) dan kurang paham sama sekali (72%). Artinya tingkat pemahamannya dalam konteks ini dapat dikatakan dangkal atau sangat dangkal. Demikian juga pemahaman responden tentang kebebasan berekspresi. Hanya 20-26% responden yang sadar betul aktivitas kebebasan berekspresi, sementara 60-64% masih tergolong pada kategori kurang paham sama sekali.

Dari tema-tema yang dipertanyakan untuk menjaring pemahaman politik ini, hanya tema peranan lembaga perwakilan dengan dua sub temanya yaitu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai jawaban dengan penyebaran variatif. Pada sub tema peranan MPR ini terlihat responden cukup banyak yang mengetahui/mampu menjelaskan. 36% sangat baik, dan 20% baik serta 14% cukup baik dan sisanya 30% kurang paham sama sekali. Sedangkan untuk sub tema peranan DPR juga terlihat fenomena yang sama, 40% sangat baik dan 14% baik serta 0% cukup baik dan 26% kurang paham sama sekali. Dari kenyataan ini jelas bahwa

lebih dari 50% responden mampu menjawab dengan memperlihatkan tingkat pengetahuan yang cukup positif.

Sepanjang data yang diungkapkan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemahaman politik perempuan adalah masih rendah atau tidak terlalu dalam. Tidak terlalu dalam atau masih rendahnya pemahaman politik perempuan terjaring melalui tema-tema yang menyangkut pengetahuan-pengetahuan dasar kepolitikan terkait dengan sistem politik.

Secara kuantitatif, tingkat pemahaman politik perempuan terklasifikasi sebagai berikut, mayoritas responden (69%) hanya memiliki pemahaman politik pada derajat cukup baik, disusul kurang 20,5% responden, 9% yang pemahaman politiknya baik dan hanya 1,5% saja yang sangat baik.

Akan tetapi pemahaman politik sebenarnya tidak selalu membangun konfidensi individu terhadap lembaga-lembaga politik maupun budaya demokratis. Sekalipun seseorang memahami betul tentang sistem politik, pemilu dan demokrasi, tetapi tidak jarang di antara mereka yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik. Ketidakpercayaan bisa merupakan pantulan dari sikap kritis tetapi juga bisa merupakan sikap yang pesimis atau bahkan apatis terhadap lembaga-lembaga politik. Bagaimanapun juga mekanisme dan lembaga-lembaga demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik apabila memperoleh masukan (input) dari masyarakat, baik yang berbetuk *demand* (kritikan, tuntutan, kontrol) maupun *support* (kepercayaan, kepedulian, dukungan). Input *demand* selalu dibutuhkan untuk mengontrol dan memelihara agar pemerintahan selalu berasal “dari” rakyat, ditentukan “oleh” rakyat dan dimanfaatkan kembali “untuk” rakyat. Kalau tidak ada *demand* yang kuat dari masyarakat, maka prinsip-prinsip demokrasi tersebut tidak bakal berjalan dengan baik. Pemerintahan buruk yang terjadi selama puluhan tahun Orde Baru sebenarnya memberi petunjuk betapa lemahnya *demand* dan *support* dari masyarakat, meskipun masyarakat sudah mempunyai pemahaman politik yang baik bahwa pemerintahan Orde Baru tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Selanjutnya, bagaimana halnya dengan identifikasi kepartaian sebagai faktor yang berperan dalam menentukan perilaku politik dalam pemilu? Identifikasi kepartaian dapat dikatakan sebagai kombinasi perasaan dan sikap yang berwujud simpati terhadap partai politik. Jadi dalam konteks ini yang terbangun pada diri individu adalah kedekatan emosional yang tidak terikat formalitas administrasi. Dengan demikian, dalam

konteks penelitian ini, identifikasi kepartaian mempunyai dua makna sekaligus. *Pertama*, adalah keterikatan seseorang pada partai tertentu. Orang mislanya akan mengidentifikasikan dirinya pendukung Partai Keadilan (PK) atau Partai Amanat Nasional (PAN) sementara yang lain mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan yang lain mendukung partai-partai lainnya. *Kedua*, sikap. Derajat dukungan atau keterikatan secara psikologis seseorang pada partai yang ia identifikasi, yang kemudian diukur dengan skala interval. Di sini akan diketahui apakah keterikatan dan dukungan seseorang pada salah satu partai itu kuat atau lemah.

Gambaran tentang identifikasi kepartaian di kalangan perempuan Kota Padang, PAN dan PPP lebih populer dibandingkan partai politik lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden sejumlah 49% menyatakan bahwa partai yang dirasakan dekat adalah PAN dan 27% PPP. Sementara itu Golkar yang selama Orde Baru mendominasi pemilu ternyata hanya sejumlah 13% responden yang merasa sangat dekat dengan partai ini. Sedangkan sisanya 6% responden menyatakan kedekatannya dengan PDI-P dan 5% lainnya PK. Jadi selain kelima partai ini di kalangan perempuan Kota Padang dapat dikatakan kurang populer. Ketidakpopuleran partai barangkali karena disebabkan kurangnya sosialisasi partai saat menghadapi pemilu baik dari segi intensitas maupun waktu, apalagi perempuan selama ini juga termarginalisasi dari kehidupan dan proses politik itu sendiri.

Selanjutnya bagaimana sikap responden terhadap partai yang dirasakan dekat dengan dirinya? Sikap responden sebagaimana yang ditunjukkan data yang diperoleh didominasi oleh cukup simpati (56%), disusul kemudian simpati serta sangat simpati yang proposinya berimbang (24% dan 20%).

Sikap responden ini tentunya akan berimplikasi terhadap perilakunya dalam menghadapi pelecehan terhadap partainya. Dalam hubungan ini reaksi responden terhadap pelecehan pada partainya menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan biasa-biasa saja dan tidak peduli atas pelecehan yang terjadi terhadap partai pilihannya, proporsinya masing-masing 61% dan 22,5%. Hanya 9% diantaranya yang merasa sangat tersinggung dan memberikan teguran serta 7,5% lainnya menyatakan tersinggung dan memendamnya dalam hati.

Temuan empiris memberikan penjelasan bahwa mayoritas responden (50%) memberikan tingkat dukungan yang lemah terhadap partainya. Sementara itu yang lainnya, 36,5% responden dukungannya

cukup kuat, 10% lemah sekali dan hanya 3,5% saja yang dukungannya kuat serta tak satupun responden yang tingkat dukungannya sangat kuat. Apakah argumen responden untuk memberikan dukungan terhadap PAN, PPP, Golkar, PDI-P maupun PK?

Berdasarkan temuan empiris terdapat lima alasan mengapa responden mengidentifikasi dirinya dengan kelima partai tersebut. Alasannya sebagai berikut : (1) partai tersebut adalah partai yang disegani (60%); (2) partai tersebut merupakan partai yang akan memperjuangkan nasib umat Islam (61,5%); (3) partai tersebut sebagai partai yang memiliki kesesuaian dengan agama yang dianut (58,5%); (4) partai tersebut sesuai dengan aspirasi (74,5%); dan terakhir, (5) sering terlibat dalam kegiatan partai tersebut (67,5%).

Penjelajahan terhadap berbagai gejala yang dikemukakan sebelumnya pada akhirnya menunjukkan derajat identifikasi kepartaian daripada responden. Sebagian besar responden berada pada derajat yang lemah yaitu sejumlah 50% responden, cukup kuat 36,5%, lemah sekali 10% dan hanya 3% saja yang identifikasi kepartaianya yang kuat serta tak satu pun ikatan psikologisnya dengan partai sangat kuat. Realitas ini memberikan peluang bagi terjadinya mobilisasi terhadap pemilih perempuan dalam pemilu.

IV. KESIMPULAN

Teralienasinya perempuan dalam kehidupan politik nampaknya berimplikasi pada tingkat pemahamannya terhadap persoalan politik sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian ini. Mayoritas responden penelitian pemahaman politiknya masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Pemahaman mereka hanya baik untuk hal-hal yang terkait dengan dunia politik riil seperti kekuasaan presiden, prinsip keterwakilan pada rekrutmen anggota dewan, pelaksanaan pemilu dan pelayanan birokrasi.

Sejalan dengan tingkat pemahaman politik yang superfisial ini maka derajat idntifikasi kepartaian dari perempuan umumnya lemah dan juga dalam hal memberikan dukungan terhadap partai yang menjadi pilihannya. Tentunya kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh sementara pihak untuk melakukan mobilisasi bagi kepentingannya memenangkan pemilu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irawan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1974. *Comparative Politics Today*. Boston : Little Brown and Co.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters : A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , 1992. *Menjelaskan Voting Behavior di Indonesia : Kasus Yogyakarta*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional IX AIPI, Surabaya, 6-8 Agustus.
- , 1996. *Sebuah Catatan Untuk Wanita Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis UGM di Yogyakarta, 12 Desember 1996.
- Hadiz, Liza, dkk. (1998). *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia*. Makalah Hasil Penelitian LBH-APIK disampaikan oleh Sri Wiyanti dalam Diskusi Politik, Hukum dan Perempuan Kerjasama LBH-APIK dan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 19 Desember 1998.
- Randall, Vicky. "Women in Politic" dalam Faisal Siagian. (1996). *Keterwakilan Wanita Indonesia di Lembaga Legislatif*. Jakarta : Analisis CSIS Tahun XXV No.3 Mei-Juni.
- Salviana, Vina. (1995). "Wanita dalam Kehidupan Politik" dalam *Suara Wanita*. Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Brawidjaja.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1984. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Uhlen, Anders. (1997). *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Rofik Suhud. Bandung: Mizan.